

Menko PMK Ungkap Dugaan ACT Potong Dana Bantuan Bencana Alam

JAKARTA (IM) - Menko PMK Muhadjir Effendy blak-blakan menyangkut keputusannya mencabut izin pengumpulan dana dan barang (PUB) Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) saat menjadi Menteri Sosial Ad Interim. Salah satu alasan izin PUB dicabut karena ada dugaan penyimpangan dana bencana alam.

Muhadjir awalnya menjelaskan soal ACT yang mengambil uang operasional dari pengumpulan dana melebihi batas seharusnya. Hal itu menurut Muhadjir sesuai dengan temuan Inspektoral Jenderal (Ijten).

"Jadi Kemensos itu hanya mencabut ketika dia mengumpulkan uang dan barang. Kenapa? Karena dia sendiri mengakui bahwa dia telah mengambil biaya untuk operasional itu di atas yang seharusnya. 10 persen, dia ngambil 13,6 persen. Tetapi berdasarkan hasil temuan Ijten. Ternyata tidak itu juga. Tidak itu dalam arti lebih tinggi," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/8).

Muhadjir juga mengungkap dugaan ACT memotong dana bantuan bencana alam. Padahal, pihak pengumpul dana tidak boleh mengambil sepeser pun dari dana bencana alam.

"Kemudian termasuk un-

tuk bencana alam itu harus nol. Tidak boleh bantuan bencana alam itu pihak pengelola, pengumpul tidak boleh mengambil satu persen pun tidak boleh. Dan ada indikasi juga dia mengambil dana-dana untuk bantuan bencana alam itu dengan jumlah tertentu," ujar Muhadjir.

Namun Muhadjir tak membeberkan lebih lanjut mengenai dugaan penyimpangan dana itu. Dia hanya mengatakan temuan itu berdasarkan laporan Ijten. "Berdasarkan laporan Ijten," ujar dia.

Atas dasar itu, Muhadjir kemudian melaporkan hal tersebut kepada Presiden Jokowi dan Mensos Tri Rismaharini yang waktu itu sedang berada di Tanah Suci. Barulah kemudian Ijten Kemensos mengaudit kondisi keuangan ACT.

"Nah kemudian kalau ada indikasi penyimpangan pidana ya Bareskrim silakan turun. Kalau itu ada masalah dengan peredaran perputaran uangnya, ya PPAITK silakan. Tapi Kemensos posisinya di situ," ujar dia.

Untuk diketahui, kasus penyimpangan dana ACT kini tengah diurus Bareskrim Polri. Bareskrim juga sudah menetapkan eks Presiden ACT Ahyudin dan Presiden ACT Ibnu Khajar sebagai tersangka. ● osm

2 Polhukam

FOTO: ANT



PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN DAFTAR KE KPU

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) berbincang dengan Ketua Partai Keadilan dan Persatuan Yussuf Solichien (ketiga kiri) ketika akan berfoto bersama saat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (1/8). Pada hari pertama pendaftaran, KPU menerima sembilan partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu 2024.

Survei Median pada Pengguna Facebook: Prabowo Ungguli Ganjar dan Anies

Median juga memprediksi akan ada empat poros dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Keempat poros itu adalah PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), koalisi Gerindra-PKB, dan koalisi NasDem-PKS-Partai Demokrat.

JAKARTA (IM) - Lembaga survei Media Survei Nasional (Median) merilis hasil survei elektabilitas calon presiden (capres). Dalam rilis survei Median, elektabilitas Prabowo Subianto mengungguli Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

Survei ini memakai metode survei media sosial menggunakan rancangan non-probability sampling. Kuesioner berbasis Google Form yang disebarluaskan melalui Facebook dengan target pengguna aktif Facebook berusia 17-60 tahun lebih.

Form pertanyaan disebar secara proporsional terhadap populasi dan tersebar di akun Facebook di 34 provinsi. Kuesioner disebarluaskan pada tanggal 21 hingga 27 Juli 2022. Hasilnya terkumpul sebanyak 1.500

responden yang tersebar di 34 provinsi.

"Hasil survei dimaksudkan untuk menggali persepsi pengguna Facebook di Indonesia yang mencapai kurang lebih 60% populasi di Indonesia," kata peneliti senior Median, Ade Irfan Abdurrahman, dalam rilis survei persepsi netizen di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

Berdasarkan pada pertanyaan tertutup dalam survei Median itu, elektabilitas Prabowo Subianto ada di posisi puncak. Prabowo dibuntuti Ganjar di posisi kedua dan Anies di posisi ketiga.

Berikut ini persentase 10 besar elektabilitas capres di survei Median, Prabowo Subianto: 19,0 persen, Ganjar Pranowo: 15,2 persen, Anies Baswedan:

14,1 persen, Agus Harimurti Yudhoyono: 5,0 persen, Ridwan Kamil: 4,0 persen, Sandiaga Uno: 2,4 persen, Muhaimin Iskandar: 1,8 persen, Erick Thohir: 1,5 persen, Andika Perkasa: 1,4 persen dan Puan Maharani: 1,3 persen.

Median juga memprediksi akan ada empat poros dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Keempat poros itu adalah PDIP, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), koalisi Gerindra-PKB, dan koalisi NasDem-PKS-Partai Demokrat.

"Berdasarkan analisis kemungkinan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkembang di media massa, sementara ini ada 4 kemungkinan pasangan yang didukung oleh poros parpol," kata Ade.

Ade Irfan menyebutkan poros PDIP yang memegang golden ticket bisa mencalonkan sendirian. Dalam skenario poros PDIP, Median menguji variasi Puan Maharani yang dipasangkan dengan Andika Perkasa, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan Ganjar Pranowo. Sedangkan skenario poros

KIB, Median memilih kandidat utamanya adalah Ganjar Pranowo. Ganjar divariasikan pasangannya dengan Erick Thohir, Ridwan Kamil, dan Andika Perkasa.

Untuk skenario poros NasDem, PKS dan Demokrat, memasangkan Anies Baswedan dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Lalu untuk poros Gerindra-PKB, ada pasangan Prabowo dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Berikut ini hasil 4 skenario paslon dalam survei Median. Skenario 1,

Prabowo Subianto-Cak Imin: 24,1 persen, Ganjar Pranowo-Erick Thohir: 19,5 persen, Anies Baswedan-AHY:

18,0 persen, Puan Maharani-Andika Perkasa: 13,4 persen dan tidak tahu/tidak jawab: 25,0 persen.

Skenario 2, Prabowo-Cak Imin: 24,5 persen, Ganjar Pranowo-Andika Perkasa: 20,0 persen, Anies Baswedan-AHY: 17,5 persen, Puan Maharani-Ridwan Kamil: 14,0 persen dan tidak tahu/tidak jawab: 24,0 persen.

Skenario 3, Prabowo Subianto-Cak Imin: 25,0 persen, Anies Baswedan-AHY: 18,0 persen, Ganjar Pranowo-Puan Maharani: 16,5 persen, Airlangga Hartarto-Erick Thohir: 10,0 persen dan Tidak tahu/tidak jawab: 30,5 persen. ● han



DPO BUPATI MEMBERAMO TENGAH

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat menunjukkan foto Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/8). Bupati Mamberamo Tengah yang diduga melarikan diri ke Papua Nugini (PNG) itu menjadi buronan sejak 15 Juli 2022.

Masyarakat Bisa Ikuti Upacara Hari Kemerdekaan 2022 di Istana

JAKARTA (IM) - Berbeda dari tahun sebelumnya, pelaksanaan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI dan Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih tahun 2022 akan dilakukan secara terbuka dengan jumlah undangan terbatas.

Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres), Heru Budi Hartono menyampaikan bahwa para menteri, ketua lembaga, dan perwira tinggi TNI-Polri, serta masyarakat umum akan diundang secara terbatas untuk hadir mengikuti jalannya upacara di Istana Merdeka, Jakarta pada 17 Agustus nanti.

"Pada tahun ini juga kita mengundang masyarakat terbatas, masih terbatas kurang lebih 1.000 sampai 2.000, kurang lebih 2 ribuan di pagi hari dan 2.000-3.000 di sore hari," ujar Heru dalam keterangannya di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (1/8).

Heru menjelaskan, khusus bagi masyarakat yang ingin mengikuti jalannya upacara di Istana wajib mendaftar di laman yang telah ditentukan dengan jumlah terbatas. Setelah mendaftar, masyarakat kemudian akan mendapatkan undangan untuk hadir mengikuti upacara secara langsung di Istana Merdeka.

"Siapa masyarakat yang ingin hadir itu akan sistemnya seperti FiFo, first in first out, artinya siapa yang cepat dia mendaftar di laman yang sudah ditentukan dan masyarakat bisa mendapatkan undangan.

Di luar itu mungkin secara otomatis sistem itu (akan) tertutup, sehingga begitu mulai hari ini di daftar sudah sampai di posisi 2.000 undangan, maka undangan untuk masyarakat sudah selesai," jelasnya.

Kegiatan Peringatan Detik-Detik Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus nanti di Istana Merdeka, menurut Heru, secara resmi akan dimulai pada pukul 09.45 WIB. Sembunyi menunggu upacara dimulai, masyarakat akan disuguhkan dengan pertunjukan kesenian yang akan ditampilkan oleh para anak bangsa.

"Nah sebelumnya tentunya kami menghibur masyarakat di seluruh penjuru, baik itu di Tanah Air maupun perwakilan-perwakilan yang berada di luar negeri. Kita mulai dari pukul 08.00 (WIB) itu sudah bisa ada hiburan secara virtual, mulai 08.30 (WIB) sudah ada hiburan di Istana yang bisa diliput, bisa dilihat oleh seluruh masyarakat," lanjutnya.

Sementara untuk rangkaian Upacara Penurunan Bendera Sang Merah Putih, Heru menuturkan akan dimulai pukul 15.00 WIB yang diawali dengan kegiatan hiburan. Sementara itu, upacara penurunan bendera secara resmi akan dimulai sekitar pukul 17.00 WIB. "Jam 3 sore kita sudah mulai kegiatan acara hiburan, memasuki pukul 4 dan pukul 5 lewat sekitar lewat 20 itu acara akan diambil alih oleh Istana, itu secara resmi penurunan bendera akan dimulai," tambahnya. ● osm

Ini Target NasDem di Pemilu 2024

JAKARTA (IM) - Partai NasDem melakukan pendaftaran sebagai peserta Pemilu 2024, Senin (1/8). Waketum NasDem Ahmad Ali membeberkan target partainya untuk Pemilu 2024.

"Kami siap jadi pemenang 2024. Insyallah kami menargetkan menjadi dua besar, karena kemarin kami berada di 4 besar, tentunya akan sangat realistis kalau kemudian kami berpikir ke depan, melihat ke depan, kami tidak mungkin berpikir ke belakang. Karena tentunya kalau kemarin kami dapat 4 terus kami tidak naik kelas, itu kami dalam posisi yang merugi. Jadi kami lihat ke depan menargetkan 2 besar," kata Ali di kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (1/8).

NasDem juga menargetkan meraih 100 kursi di DPR RI pada pemilu 2024. Ali mengatakan dalam menghadapi pemilu nantinya NasDem sudah memiliki jumlah pengurusan yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

"Insyallah kami menargetkan 100 kursi di pemilu

2024. Alhamdulillah parati NasDem mulai dari DPP sampai kecamatan, kepengurusannya lengkap 100% dengan keanggotaan 378 kurang lebih yang diinptu di Sipol dan keterwakilan perempuan 32% artinya secara keterwakilan memenuhi persyaratan Undang-undang," jelasnya.

Ali tak berkomentar panjang ketika ditanya soal koalisi. Dia menegaskan NasDem mencoba membangun komunikasi dengan berbagai Parpol untuk nantinya menjadi koalisi.

"Kemudian NasDem coba bangun komunikasi politik dengan Parpol-parpol untuk kemudian dijajaki kemungkinan-kemungkinan untuk kita melakukan koalisi. Karena NasDem di Pemilu 2024 nanti tidak bisa mengungsi sendiri, karena kami baru 10% lebih, Undang-undang mensyaratkan 20% mau tidak mau kita bekerja sama," imbuhnya.

Partai NasDem juga mengaku tak ada masalah dengan PDIP meski belakangan ini kerap didera debat politik cukup panas. NasDem men-

gatakan Ketum NasDem Surya Paloh dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri bersahabat.

"Jadi PDIP-NasDem ini nggak ada masalah, kami partai sahabat, teman, antara Bu Mega dan Pak Surya juga adalah sahabat. Sesungguhnya tidak pernah ada masalah, kemudian dibuat seakan-akan ada masalah. Nggak ada (masalah)," kata Ali.

Lebih jauh Ali menjelaskan bahwa tidak ada yang perlu dipersiapkan untuk bertemu dengan PDIP. Karena NasDem mengaku dengan PDIP tak ada masalah.

NasDem merasa dirinya dan PDIP koalisi yang sudah teruji pada Pemilu 2014 dan 2019. NasDem bersama PDIP sama-sama mengungguli untuk jadi presiden pada dua periode itu.

Namun, muncul pula isu bahwa PDIP tak ingin mengganggu kemesraan NasDem dengan PKS dan Partai Demokrat. Sementara NasDem merasa tak bisa membatasi diri hanya berkomunikasi dengan sejumlah partai saja. ● osm



SIDANG TUNTUTAN DONO PURWOKO

Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) periode 2011-2014 Dono Purwoko (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya se usai pembacaan tuntutan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (1/8). Dono dituntut empat tahun penjara karena diduga melakukan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam negeri (IPDN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun anggaran 2011.

Surya Darmadi dan Eks Bupati Inhu Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Bupati Indragiri Hulu (Inhu) R Thamsir Rachman dan pemilik PT Duta Palma, Surya Darmadi, sebagai tersangka. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait lahan PT Duta Palma.

"Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan dua orang tersangka terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam kegiatan pelaksanaan yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam tindak pidana korupsi, ditetapkan dua orang tersangka, yaitu RTR selaku Bupati Kabupaten Indragiri Hulu periode 1999 sampai dengan 2008, dalam tindak pidana pencucian uang, ditetapkan satu orang tersangka, yaitu SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group," kata Ketut dalam keterangan pers tertulis, Senin (1/8).

Ketut mengatakan Thamsir Rachman diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara itu, Surya Darmadi dijerat Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan/atau Pasal 3 atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disebutkan Ketut, Thamsir saat ini sedang menjalani vonis dalam perkara dugaan korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu 2005-2008. Sementara itu, Surya Darmadi merupakan buron KPK.

"Adapun dua orang ter-

sangka yaitu tersangka RTR sedang menjalani vonis pidana dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana kasbon APBD Indragiri Hulu Tahun 2005-2008 Sementara itu, Tersangka SD dimusatkan dalam daftar pencarian orang (DPO) di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujarnya.

Kejaksaan Agung (Kejagung) sebelumnya melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di wilayah Riau. Kejagung menyatakan lahan yang dikelola secara melawan itu seluas 37.095 hektare (Ha).

"Kejaksaan melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyerobotan lahan kawasan PT Duta Palma Group dengan uraian PT Duta Palma melakukan pengelolaan lahan seluas 37.095 hektare secara tanpa hak melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan perekonomian negara," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam jumpa pers di Gedung Kartika Kejagung, Jakarta Selatan, Senin (27/6).

"Di mana PT Duta Palma telah membuat dan mendirikan lahan seluas itu tanpa dilandasi oleh hak yang melekat atas perusahaannya. Jadi dia ada lahan, tapi lahannya tanpa ada surat apa-apa," sambungnya.

Burhanuddin mengatakan pemilik PT Duta Palma saat ini masih berstatus buron KPK. Burhanuddin menjelaskan pengelolaan lahan tersebut selama ini menguntungkan pemilik perusahaan PT Duta Palma dan operasional lahan tersebut diduga mengalir kepada buron itu. "Kemudian pemiliknya adalah atau yang disebutkan dalam PT dulu, PT Duta Palma ini, pemiliknya dalam posisi DPO oleh KPK Selama dia melakukan perbuatan ini, bahkan selama DPO perusahaan ini menggunakan profesional, tapi keuangannya langsung dikirim, berada di mana DPO itu berada," ujarnya.

Kejagung, kata Burhanuddin, juga telah menyita lahan tersebut. Penyitaan itu kemudian ditipikan ke PTIPN V, Riau. ● han

PENGUMUMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF (KIK) DAN PROSPEKTUS REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5

Menindaklanjuti rencana perubahan KIK dan Prospektus SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5 yang telah diumumkan melalui surat kabar harian "International Media" tertanggal 24 Januari 2022, kami, PT Syailendra Capital selaku Manajer Investasi dari REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5, dengan ini bermaksud menyampaikan pelaksanaan perubahan Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") dan Prospektus REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5 sebagaimana termaktub dalam akta Addendum REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5.

Rincian perubahan ketentuan dalam KIK dan Prospektus tersebut di atas dapat diperoleh di Manajer Investasi.

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada para Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SYAILENDRA MONEY MARKET FUND 5 serta pihak-pihak yang berkepentingan.

SYAILENDRA
Jakarta, 2 Agustus 2022

Manajer Investasi
PT Syailendra Capital
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

PENGUMUMAN RENCANA PENYAMBAL ALIHAN PT TEKNOLOGI KULINER KEKINIAN

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan (8) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan ini diumumkan kepada semua pihak dan karyawan bahwa adanya rencana pengambilalihan atau sebagai dan atau seluruh saham-saham milik PT TEKNOLOGI KULINER KEKINIAN ("Perseroan"), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Barat, yang mengakibatkan perubahan pengendalian pada Perseroan.

Bagi Kreditor atau pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dapat mengajukan keberatannya secara tertulis mengenai rencana akuisisi tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal pengumuman ini kepada:

PT TEKNOLOGI KULINER KEKINIAN
Soho Capital Podomoro City 19th Floor
Jl Letjen. S. Parman Kav 27
Tanjung Duren Selatan - Grogol Petamburan
Jakarta Barat

Jakarta, 02 Agustus 2022
Direksi
PT TEKNOLOGI KULINER KEKINIAN

PENGUMUMAN HASIL AKHIR PROSES PEMERUBAHAN DAN LIKUIDASI PT. HALO SOLUSI UTAMA (DALAM LIKUIDASI)

Likuidator PT. HALO SOLUSI UTAMA (dalam likuidasi) berkedudukan di Jakarta Utara (untuk selanjutnya disebut "Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa pelaksanaan pembebasan harta kekayaan dan kewajiban Perseroan sehubungan dengan proses likuidasi telah diselesaikan dengan sebagaimana mestinya, dan laporan pertanggungjawaban dari Likuidator mengenai keseluruhan proses pelaksanaan dan penyelesaian likuidasi telah disampaikan oleh Likuidator kepada dan diterima dengan baik oleh Pemegang Saham Perseroan, sebagaimana terdapat dalam Laporan Likuidasi dan Laporan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 16-07-2022 (enam belas Juli dua ribu dua puluh dua) Nomor: 08, yang dibuat di hadapan HULIANI SANTOSO, S.H., Notaris di Kota Jakarta Barat. Keputusan Pemegang Saham tersebut sekaligus memberikan pembebasan dan tanggung jawabnya selaku Likuidator Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya selaku Likuidator Perseroan.

Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 02 Agustus 2022
PT. HALO SOLUSI UTAMA